



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VI DPR RI
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VI DPR
KE PT DIRGANTARA INDONESIA PROVINSI JAWA BARAT
PADA MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2022-2023**

Tanggal 26 s.d. 28 Juni 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

2023



LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VI DPR RI
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VI DPR
KE PT DIRGANTARA INDONESIA PROVINSI JAWA BARAT
PADA MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2022-2023

Tanggal 26s.d. 28 Juni 2023

I. PENDAHULUAN

A. Dasar

Berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan UU Nomor 42 Tahun 2014, dan kedua dengan UU Nomor 2 Tahun 2018 dan ketiga dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 dan Pasal 60 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib mengatur bahwa Komisi dalam melaksanakan tugas di bidang pengawasan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, antara lain dapat mengadakan kunjungan kerja spesifik dalam masa sidang, yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti.

Mengacuh pada undang-undang tersebut, maka kunjungan kerja ini juga dilaksanakan atas Keputusan Pimpinan DPR RI tentang Penugasan Anggota Komisi I sd komisi XI DPR RI untuk melakukan Kunjungan Kerja dan Keputusan Rapat Intern Komisi VI DPR RI.

B. Obyek Kunjungan Kerja

Objek kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI adalah PT Dirgantara Indonesia (Persero) di Bandung serta menghadirkan Pejabat BUMN setingkat eslon satu Kementrian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN) RI.

C. Maksud dan Tujuan

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ini dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi Dewan dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kebijakan maupun program pemerintah, khususnya yang terkait dengan bidang tugas Komisi VI DPR RI yakni Perdagangan, Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, BUMN dan Persaingan Usaha.

Kunjungan kerja Spesifik Komisi VI DPR RI juga bertujuan untuk mendapatkan penjelasan dari Dirut PT Dirgantara Indonesia (Persero) terkait perkembangan Kinerja Korporasi terutama di Jawa Barat.

Seperti yang kita ketahui PT Dirgantara Indonesia (PTDI) adalah perusahaan milik negara yang didirikan di Bandung pada Tahun 1976 yang semula bernama PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN) dengan Direktur Utama Prof. Dr. Ing. B.J.Habibie. Pada tanggal 24 Agustus 2000, IPTN secara resmi diubah Abdurrahman Wahid, Presiden RI pada saat itu menjadi PT DIRGANTARA INDONESIA (PTDI) atau Indonesian Aerospace/Iae.

PTDI merupakan salah satu perusahaan aerospace di Asia dengan kompetensi inti dalam desain dan pengembangan pesawat, pembuatan struktur pesawat, produksi pesawat, dan layanan pesawat untuk sipil dan militer dari pesawat ringan dan menengah.

Badan Usaha Milik Negara ini memproduksi berbagai jenis pesawat terbang untuk memenuhi kebutuhan maskapai penerbangan sipil, operator militer, dan kebutuhan misi khusus. PTDI sudah berpengalaman dalam bidang desain pesawat terbang, mampu merancang pesawat terbang baru, dan mengubah konfigurasi serta struktur sistem pesawat untuk tujuan misi khusus seperti patroli laut, pengawasan, dan penjagaan pantai. Di bidang pembuatan pesawat, PT Dirgantara Indonesia telah memproduksi berbagai jenis pesawat, seperti CN235 untuk transportasi sipil atau militer, Pesawat Surveillance Maritim, Pesawat Patroli Maritim, dan pesawat Penjaga Pantai.

PT Dirgantara Indonesia bekerja sama dengan LAPAN telah sukses membangun pesawat N219 dan telah melakukan uji terbang perdana pesawat N219 pada tanggal 16 Agustus 2017. Pesawat N219 merupakan pesawat penumpang dengan kapasitas 19 orang dengan dua mesin turboprop yang mengacu kepada regulasi CASR Part 23. Pesawat ini memiliki kemampuan lepas landas di landasan pendek yang tidak dipersiapkan sehingga akan menjadi pendukung konektivitas antar pulau terutama di wilayah Perintis.

Selain pesawat sayap tetap, PT Dirgantara Indonesia juga memproduksi berbagai jenis helikopter, seperti NAS330 Puma, NAS332 C1 Super Puma, H215, H225M/H225, AS365/565, H125M/H125 dengan lisensi dari Airbus Helicopters dan Bell 412EPI dengan lisensi dari Bell Helicopter Textron Inc. (BHTI).

Dalam bisnis aerostructure, PTDI memproduksi komponen, peralatan, dan perlengkapan pesawat untuk Airbus A320/321/330/350/380, untuk Helikopter Airbus MKII dan H225M/H225, juga untuk Airbus Defense & Space CN235 dan CN295.

Di bidang teknik & pengembangan, PTDI memiliki kemampuan teknis dalam desain, pengujian dan sertifikasi pesawat, simulator penerbangan, dan Kendaraan Udara Tak Berawak (UAV). Unit Layanan

Pesawat PTDI juga menyediakan pemeliharaan, perbaikan, dan dukungan logistik untuk CN235, NC212-100/200/400, NC212i, Bell412, BO-105, NAS 330 Puma, NAS332 Super Puma, B737-200/300/400/500.

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI juga dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan yang berhubungan dengan perkembangan kinerja Pemerintah Daerah dan BUMN koordinasi dan sinergisitas dengan kementerian BUMN, serta permasalahan dan kendala yang dihadapi sekaligus upaya penyelesaiannya termasuk terkait dengan peran BUMN dalam penanganan dampak pandemic covid-19 dan ancaman resesi terutama di lingkungan Provinsi Jawa Barat.

D. Waktu dan Acara Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI

Pada Hari Selasa 27 Juni 2023 pukul 14.00 WIB Tim Komisi VI melakukan pertemuan dengan Ibu Liliek Mayasari, Asisten Deputi Bidang Industri Manufaktur, Kementerian BUMN RI, Bapak Gita Amperiawan, Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Beserta Jajaran Direksi.

Hasil dari kunjungan kerja spesifik ini akan menjadi masukan bagi Komisi VI DPR RI untuk memberikan rekomendasi bagi pemerintah terkait dengan pengawasan BUMN sebagai korporasi yang dimiliki Negara dan arah kebijakan pemerintah terkait perkembangan BUMN sebagai salah satu sumber pendapatan negara.

E. Susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa Barat

Susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI sesuai dengan Surat Tugas DPR RI Tanggal 26-284 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

NO	NO. ANGGOTA	N A M A	KETERANGAN
1.	A-103	MOHAMAD HEKAL, M.B.A.	PIMP./F.GERINDRA
2.	A-196	ADISATRYA SURYO SULISTO	F. PDIP
3.	A-181	Dr. EVITA NURSANTY, M. Sc.	F. PDIP
4.	A-96	MULAN JAMEELA	F. GERINDRA
5.	A-362	Drs. H. NYAT KADIR	F. NASDEM
6.	A-361	ZURISTYO FIRMADATA, S.E., M.M.	F. NASDEM
7.	A-11	TOMMY KURNIAWAN	F. PKB
8.	A-40	H. ALI AHMAD	F. PKB
9.	A-544	Dr. Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.	F. PD

NO	NO. ANGGOTA	N A M A	KETERANGAN
10.	A-554	Dr. EDHIE BASKORO YUDHOYONO, B.Comm., M.Sc.	F. PD
11.	A-447	AMIN A.K., M.M.	F. PKS
12.	A-416	Hj. NEVI ZUAIRINA	F. PKS
13.	A-485	H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A	F. PAN
14.	A-416	ELLY RACHMAT YASIN	F. PPP

II. TEMUAN LAPANGAN

Hasil Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Bandung, Provinsi Jawa Barat ke PT Dirgantara Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut :

I. HASIL KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI KE BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT DENGAN AGENDA SEBAGAI BERIKUT:

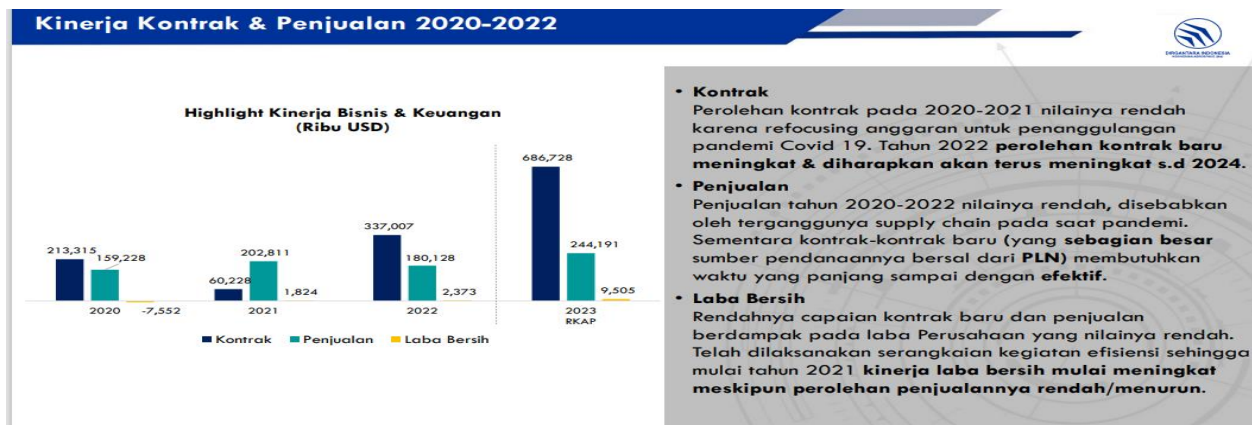


Team Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI Provinsi Jawa Barat, Bandung, 27 Juni 2023 dengan Ibu Liliek Mayasari, Asisten Deputi Bidang Industri Manufaktur, Kementerian BUMN RI, Bapak Gita Amperiawan, Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Beserta Jajaran Direksi **di pimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Bapak MOHAMAD HEKAL, M.B.A.**

Temuan Lapangan sebagai berikut :

PT Dirgantara Indonesia (Persero)

1. Kinerja Kontrak dan Penjualan 2020-2022 masih relative kecil terkait dampak covid-19 dan mulai meningkat pada Tahun 2023, namun tidak berdampak pada peningkatan penjualan maupun laba bersih yang signifikan.



2. Hutang Masa Lalu dan Dampaknya terhadap setiap penerimaan PT DI yaitu terkait pembayaran Bunga dan cicilan pokok hutang akan menggerus penerimaan sebesar 95% atau 5% saja yang masuk sebagai porsi PT DI

HUTANG BANK

Reprofilng Hutang Pokok ke BRI dan BNI **USD 100 juta**. Jatuh Tempo tahun 2023:

- Pokok : **USD 9,67 juta**
- Bunga : **USD 6,19 juta**

Hutang dengan aging paling lama adalah **tahun 2015**

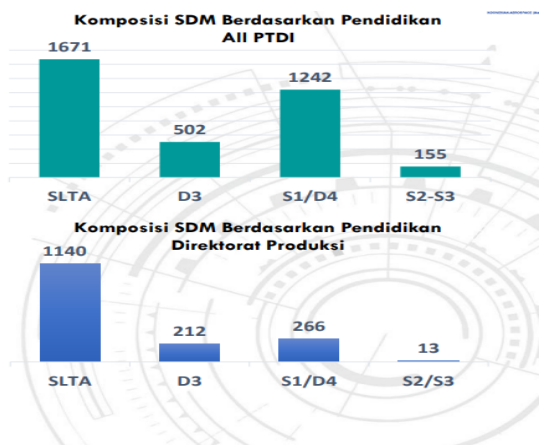
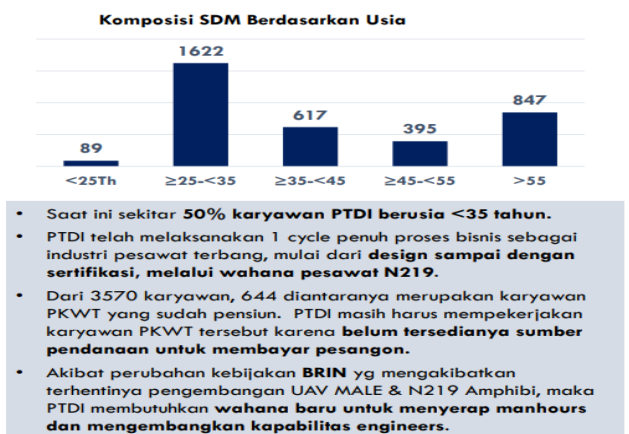
Dampak hutang masa lalu pada perbankan terhadap operasional PTDI saat ini:

- Bank mengambil sebagian porsi atas setiap penerimaan PTDI untuk **mencicil pembayaran hutang masa lalu dan bunga atas pokok LC**-nya.
- Contoh kasus pada program H225M, PTDI hanya memperoleh porsi **5% dari seharusnya 15%**.
- Pembagian porsi tersebut **tidak selalu sama** untuk setiap project (lebih besar/lebih kecil).

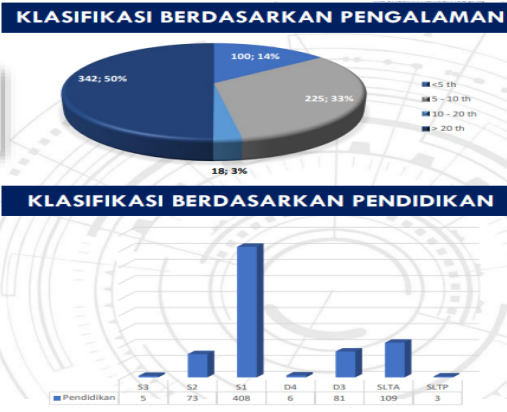
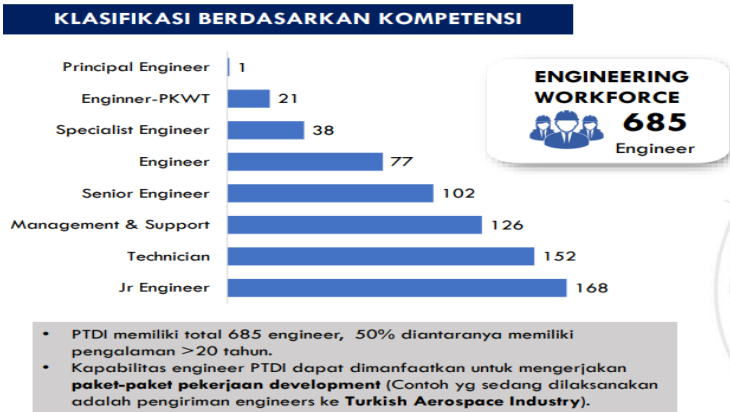
Contoh pembagian dana dengan perbankan untuk Program H225M:

Keterangan	Ccy	Nilai	%tase
Penerimaan Prog. H225M:			
FRA Batch 1 (HC 1&2)	EUR	10,093,596	
FRA Batch 3 (HC 5&6)	EUR	9,299,422	
Total Penerimaan	EUR	19,393,018	100%
Pengeluaran Prog. H225M:			
Hutang pokok LC:			
Bank Mandiri	EUR	15,164,808	
Bank BRI	EUR	1,249,599	
Subtotal	EUR	16,414,407	85%
Pembayaran lain:			
Bunga LC Bank BRI	EUR	1,670,000	
Cicilan hutang masa lalu	EUR	297,860	
Subtotal	EUR	1,967,860	10%
Total Pengeluaran	EUR	18,382,267	95%
Porsi PTDI	EUR	1,010,751	5%

3. Sumber Daya Manusia PT Dirgantara Indonesia, belum ada penyelesaian terkait pesangon karyawan yang dirumahkan sebagian diperkerjakan kembali dengan status karyawan kontrak.



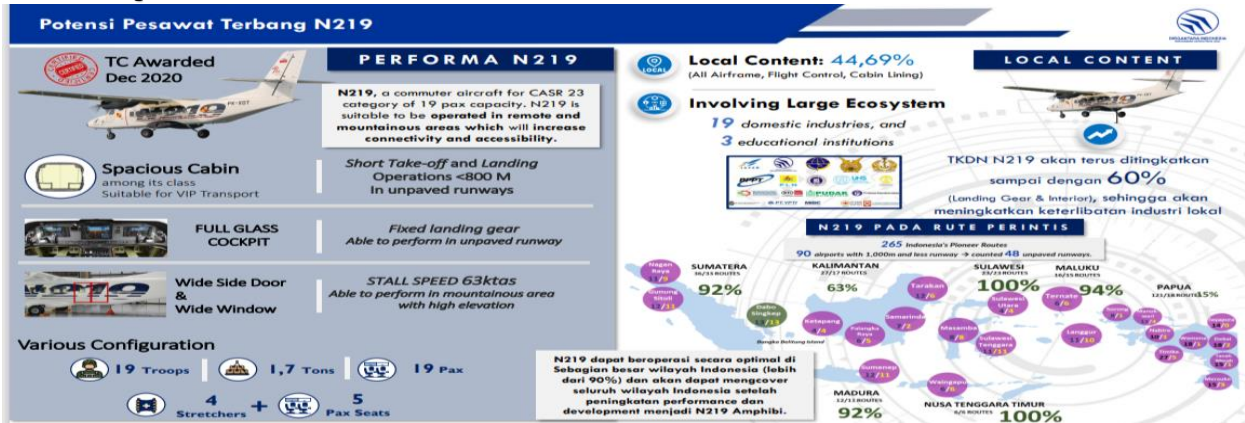
4. Sumber Daya Manusia PT Dirgantara berdasarkan kompetensi, dari 685 karyawan 50% dengan pengalaman kerja lebih dari 20 Tahun dengan Pendidikan 70% lebih berpendidikan SI, S2 dan S3.



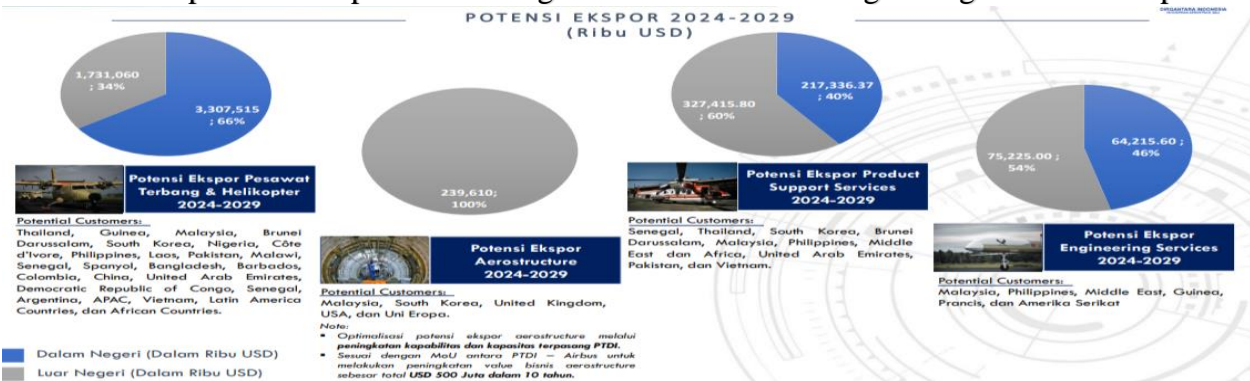
5. Transformasi Keuangan dilakukan dengan penguatan keuangan, terdiri dari 5 program utama yaitu Restrukturisasi Keuangan, PMN Non Tunai, PMN Tunai, Restrukturisasi Korporasi dan Penjaminan Proyek.

Restrukturisasi Keuangan	PMN Non Tunai TA 2024	PMN Tunai TA 2023	Restrukturisasi Korporasi	Penjaminan Proyek
01	02	03	04	05
Untuk menyelesaikan utang masa lalu Perusahaan melakukan reprofiling pinjaman senilai Rp 1.64 T	Untuk memperbaiki struktur Permodalan PTDI melakukan Konversi Hutang Ex-BPPN sebesar Rp 649 M. Konversi tersebut sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan dan akan masuk pada APBN tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> Untuk meningkatkan kemampuan investasi berupa investasi fasilitas produksi dan MRO, dalam rangka mendukung percepatan pemenuhan Essential Force Total PMN Tunai PT DI 543M 	Inisiatif strategic dalam mengatasi keterbatasan likuiditas : <ul style="list-style-type: none"> Restrukturisasi strategi Restrukturisasi bisnis Restrukturisasi organisasi & SDM Restrukturisasi Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> Penjaminan Pemerintah atas Proyek PTDI, sangat diperlukan mengingat adanya: <ol style="list-style-type: none"> Defisit modal kerja Keterbatasan covenant Dalam Status Reprofiling Pinjaman Proyek-proyek PTDI Sebagian besar merupakan proyek Pemerintah

6. Produk Unggulan PT Dirgantara Indonesia yaitu Pesawat N219 untuk penjulanan domestic dan ekspor



7. Potensi Ekspor Produk-produk PT Dirgantara Indonesia dan Negara-negara Sasaran ekspor



8. Peluang Bisnis PT Dirgantara Indonesia terkait UU No. 12 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan

Implementasi Kebijakan Strategis Industri Pertahanan

UU No. 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan masih dapat dioptimalkan implementasinya di PTDI

Topik regulasi (Undang-undang No.16 Tahun 2012)



Pasal 8 (3): Pengguna wajib menggunakan alat pertahanan dan ketahanan yang di produksi dalam negeri



Pasal 43 (5.e): Adanya imbal dagang, kandungan local, dan/atau offset paling rendah 85%



Pasal 43 (5.f): Akuisisi asing membutuhkan konten lokal/ offset paling rendah 35% dengan peningkatan 10% setiap 5 tahun



Pasal 38 (2): Kegiatan produksi harus memprioritaskan penggunaan bahan baku dan komponen domestik

- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
- Inpres Nomor 2 Tahun 2022
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019

Aplikasi di PTDI

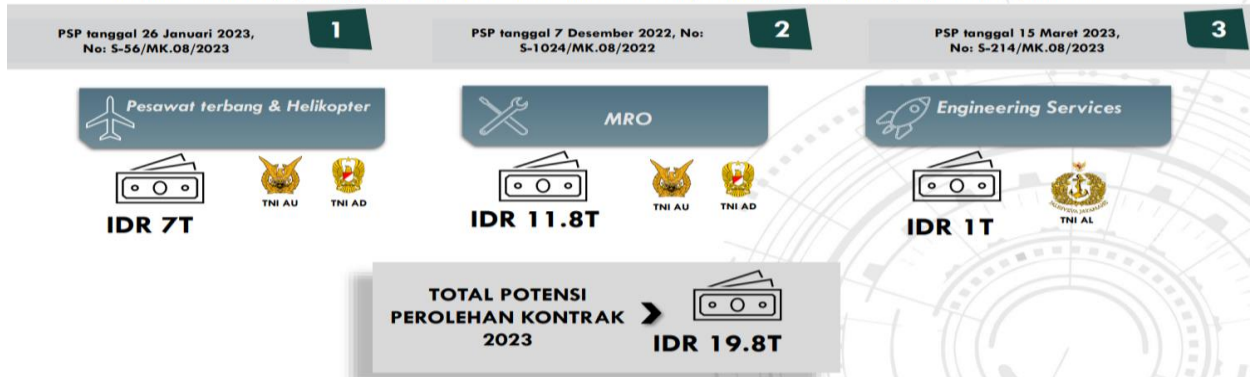
- Selain pesawat terbang, PTDI juga memiliki portofolio produk helikopter yang merupakan hasil kolaborasi industri dengan Bell Helicopter & Airbus Helicopter.
 - Pengadaan helikopter dapat dilakukan melalui PTDI.
 - Belum adanya imbal dagang atas pengadaan Alpa Hankam dari luar negeri yg masuk ke PTDI.
 - PTDI memiliki kapabilitas engineering yang memadai sehingga perolehan offset diharapkan dapat dalam bentuk Engineering Work Package atau paket-paket pekerjaan lainnya yang mendatangkan revenue.
 - PTDI memiliki produk-produk dengan nilai TKDN yang tinggi, salah satunya adalah pesawat N219 yang nilai TKDN-nya sebesar 44.69%
 - TKDN suatu produk diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan utama dalam akuisisi Alpa Hankam Nasional.
- Kewajiban penggunaan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan BMP paling sedikit 40% (empat puluh persen).

9. Target Perolehan Potensi Kontrak dari Kementerian Pertahanan Tahun 2023 sebesar Rp. 19,8 Triliun

Target Perolehan Kontrak Kementerian Pertahanan tahun 2023



Berdasarkan seluruh program yang telah masuk ke dalam dokumen Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP) Kemenkeu, referensi:



Saat ini PTDI juga memiliki 2 kontrak yang belum efektif, yaitu 1 unit CN235 untuk TNI AL dan Modernisasi C-130 TNI AU

10. Dukungan yang Diharapkan dari Komisi VI DPR RI

Komersialisasi N219

- PTDI memiliki produk **N219** yang dapat dimanfaatkan untuk **meningkatkan konektivitas** dalam rangka **pemerataan ekonomi daerah**.
- Pesawat N219 memiliki nilai **TKDN sebesar 44.69%**.
- PTDI membutuhkan dukungan komersialisasi pesawat terbang N219 dengan target pasar **Pemerintah Daerah**.
- Dukungan **insentif fiskal** terkait pajak dan fasilitas pembiayaan untuk pembeli N219.

Penguatan Ekosistem Industri Pertahanan

- Optimalisasi implementasi UU No. 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan untuk **meningkatkan kontribusi domestik** dalam pemenuhan Alpakankam, termasuk peningkatan **IDKLO**.
- Enforcement PerPres No.12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni wajib memilih produk yang memiliki **TKDN > 40%** apabila tersedia.

Revitalisasi PTDI

- Dukungan perolehan **PMN Tunai tahun 2023** (USD 543 M) untuk peningkatan fasilitas Produksi dan **PMN Non Tunai** (IDR 649 M) pada tahun 2024 untuk penguatan struktur permodalan
- Penyelesaian **beban masa lalu Perusahaan** melalui dukungan Pemerintah.
- Penambahan **Term of Payment** kontrak dari 6 menjadi 8 tahap.
- PTDI dapat memperoleh kontrak dengan sumber pendanaan **PDN/Rupiah murni**.

Program Pengembangan

- PTDI memiliki **685 engineer**, dimana 50%-nya telah **berpengalaman >20 tahun**.
- Optimalisasi utilisasi engineer PTDI dapat dilakukan dengan cara mengerjakan program-program Pemerintah dengan skema **Co-Development**.
- Saat ini pengembangan N219 Amphibi dan UAV MALE **terhenti** karena perubahan kebijakan pendanaan BRIN. PTDI mengharapkan adanya **dukungan pendanaan melalui K/L lainnya**.

III. REKOMENDASI

1. Komisi VI DPR RI menerima paparan dan penjelasan dari Ibu Liliek Mayasari, Asisten Deputi Bidang Industri Manufaktur, Kementerian BUMN RI, Bapak Gita Amperiawan, Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, Bapak Wildan Arief, Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Sumber Daya Manusia PT Dirgantara Indonesia, Bapak Batara Silaban, Direktur Produksi PT Dirgantara Indonesia, Bapak Moh. Arif Faisal, Direktur Niaga, Teknologi dan Pengembangan PT Dirgantara Indonesia
2. Komisi VI DPR RI menilai permasalahan pokok PT Dirgantara Indonesia adalah masalah keuangan, pemasaran dan masalah manajemen yang harus segera dibenahi.
3. Komisi VI DPR RI mendukung PT Dirgantara Indonesia melakukan kebijakan good governance yang ketat .
4. Komisi VI DPR RI mendukung Restrukturisasi keuangan dan korporasi PT Dirgantara Indonesia termasuk dalam hal hutang di Perbankan Himbara, kewajiban terhadap hak-hak pegawai yang dirumahkan dan kewajiban korporasi lainnya seperti terhadap tagihan pihak vendor.
5. Komisi VI DPR RI mendukung peningkatan SDM pegawai dan peningkatan status kepegawaian menjadi pegawai tetap.
6. Komisi VI DPR RI mendukung PT Dirgantara Indonesia untuk mendapatkan PMN non Tunai dan PMN Tunai dari pemerintah
7. Komisi VI DPR RI mendukung PT Dirgantara Indonesia mengembangkan produknya seperti N219 baik untuk kepentingan domestic maupun untuk eksport.
8. Komisi VI DPR RI mendukung PT Dirgantara Indonesia mendapatkan kontrak dari Kementerian Pertahanan RI dalam mengembangkan industri pertahanan di bidang matra udara.

IV. PENUTUP

Demikianlah laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa Barat diharapkan menjadi bahan masukan bagi Komisi VI DPR RI dalam rangka mengawasi kinerja BUMN serta rekomendasi bagi pemerintah, terkait dengan pengawasan program dan kebijakan pemerintah.

Jakarta, 12 Juli 2023

Ketua Tim Kunker Spesifik Komisi VI DPR RI

Provinsi Jawa Barat

TTD

MOHAMAD HEKAL, M.B.A

A103

Lampiran Dokumen :



Team Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI Jawa Barat pada 27 Juni 2023 yang dipimpin oleh Bapak Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Bapak MOHAMAD HEKAL, M.B.A.



Team Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI Jawa Barat pada 27 Juni 2023 yang dipimpin oleh Bapak Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Bapak MOHAMAD HEKAL, M.B.A.



Team Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI Jawa Barat pada 27 Juni 2023 yang dipimpin oleh Bapak Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Bapak MOHAMAD HEKAL, M.B.A.



Team Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI Jawa Barat pada 27 Juni 2023 yang dipimpin oleh Bapak Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Bapak MOHAMAD HEKAL, M.B.A.

